

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bagjana, I. F., Jaenudin, E., Ikram, S., Kusumah, R. W. R., Puspitasari, E., & Kurniawan. (2021). *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Konsep dan Implementasi)*. Yrama Widya.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Darmadi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. CV Alfabeta.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2014a). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2014b). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep, dan aplikasi*. Salemba Empat.
- Irdaus, C. M. (2014). *Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pembangunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Azza Grafika.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT Refika Aditama.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2007). *Manajemen Publik*. Grasindo.

JURNAL:

- Adha, N., Usman, H., & Haedar. (2018). Pengaruh sumber daya alam, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah di kota palopo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 7, No.1 (2021) 46-55, 1*.
- Amalia Fauziah N, A., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting, 8(2), 1-13*.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 1(2), 105-113*. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, 13(1), 30-39*.
- Arpani, W. N., & Halmawati. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah. *2(1), 2373-2390*.
- Baviga, R., & Bahrin, Z. (2022). Pengaruh Pad, Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020. *Profita, 4(1), 52-62*. <http://ejournal.stie-sak.ac.id/index.php/62201/article/view/291>
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat). *Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 02(19)*.
- Ernawati, & Riharjo. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan*

Riset Akuntansi, 06(02).

- Hutahaean, & Margaretha, S. G. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
- Ihsan Wahyudi, & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.
- Kristina, S. R., Naukoko, A. T., Siwu, & F, D. H. (2021). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal EMBA*, 1(9), 453–461.
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14.
- Mahardika, E. P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 407–416.
- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 110.
- Nurhayati, N., Purnama, D., Nurhandika, A., & Wiharno, H. (2022). *The Effect of Capital Expenditures, Personnel Expenditures and Balancing Funds toward Regional Financial Independence in Regency Governments at West Java*.
- Prastiwi, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. *Seminar Nasional IENACO*, 872–879.
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 20(1), 105–123.
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111–134.
- Sanga, K. P., Hermanto, S. B., & Handayani, N. (2018). Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2(2).
- Santoso, I., & Suparta, I. W. (2015). Flypaper Effect pada Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 135.

- Saraswati, N. P., & Nashirotn Nisa Nurharjanti. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Sari, P. I. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014). *Universitas PGRI Al Yogyakarta*, 2015, 538–545.
- Utari Handayani, T., & Erinoss. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348–2361. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216>

PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 69 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 69 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

WEBSITE:

Arif Budiarto. (2022). *Realisasi Belanja APBD Jabar Sangat Rendah*. <https://jabar.inews.id/amp/berita/realisasi-belanja-apbd-jabar-sangat-rendah-periode-januari-juni-baru-27-persen>

Edi Suwiknyo. (2019). *Desentralisasi Fiskal Belum Optimal, Ketergantungan*

Daerah ke Pusat Masih Tinggi.
<https://m.bisnis.com/amp/read/20190528/9/928193/desentralisasi-fiskal-belum-optimal-ketergantungan-daerah-ke-pusat-masih-tinggi>

Nunik Anisah- Bps.Jabar. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 2021.*
<https://jabar.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2021&Publikasi%5BkataKunci%5D=Apbd&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

Sekretariat Jendral. (2021). *Pemda Harus Berinovasi untuk Wujudkan Kemandirian Fiskal Daerah.*<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34485>

Wildan, M. (2019). *Alokasi APBD Paling Dominan untuk Belanja Pegawai.*
<https://m.bisnis.com/amp/read/20190719/10/1126443/alokasi-apbd-paling-dominan-untuk-belanja-pegawai->